

Evaluasi Pengawasan Bakamla Terhadap *Illegal Fishing* di Natuna

Muhammad Fitra Hardinata¹

Erlin Cristinia Halawa²

Putri Rini Situmeang³

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang^{1,2,3}

Email: fitra8371@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran Bakamla dalam menjaga perairan natuna dan cara penanganan yang dilakukan oleh Bakamla dalam menghadapi *illegal fishing*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, web dan artikel-artikel terkait. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk menjabarkan dan menganalisis kasus terkait evaluasi terhadap kebijakan penanganan *illegal fishing* di Natuna. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bakamla masih kurang efektif dalam melakukan pengawasan di laut Natuna karena pengawasan yang cenderung terbatas dan Bakamla bergerak jika terdapat potensi kejadian atau laporan yang masuk. Evaluasi efektivitas menunjukkan bahwa Bakamla berhasil mengidentifikasi sejumlah kasus penangkapan ikan ilegal di wilayah Natuna, namun masih banyak kapal ikan asing yang berhasil lolos. Evaluasi efisiensi menunjukkan bahwa kecukupan Bakamla dalam melakukan pengawasan di laut Natuna masih kurang karena jumlah anggaran yang terbatas sehingga Bakamla hanya dapat melakukan patroli sebanyak 40 kali dalam setahun. Evaluasi kecukupan, Bakamla telah melakukan strategi berupa peningkatan kapasitas SDM dan peralatan, melibatkan instansi lainnya, dan pengerahan partisipasi masyarakat secara langsung, namun kecukupan Bakamla dalam melakukan pengawasan masih kurang. Evaluasi pemerataan, Bakamla telah melakukan pembagian wilayah maritim yaitu wilayah utara yang dominan lautan dan wilayah selatan yang banyak terdapat daratan, namun dalam pemerataan ini Bakamla masih belum maksimal sebab kapal patroli yang dibutuhkan belum mencukupi. Evaluasi responsifitas dan ketepatan, Bakamla melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga akan tetapi Bakamla belum melakukan koordinasi secara efektif antar instansi dalam proses pelaksanaan kegiatannya.

Kata Kunci: Bakamla; *Illegal Fishing*; Natuna

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the role of Bakamla in protecting Natuna waters and the handling methods carried out by Bakamla in dealing with illegal fishing. The method used in this research is a literature study related to the research topic such as books, journals, web and related articles. The data obtained is then collected and used to describe and analyze cases related to the evaluation of policies to deal with illegal fishing in Natuna. The results show that Bakamla is still ineffective in conducting surveillance in the Natuna sea because surveillance tends to be limited and Bakamla moves if there are potential incidents or incoming reports. The effectiveness evaluation shows that Bakamla has succeeded in identifying a number of illegal fishing cases in the Natuna area, but there are still many foreign fishing vessels that have escaped. The efficiency evaluation shows that the adequacy of Bakamla in conducting surveillance in the Natuna sea is still lacking due to the limited amount of budget so that Bakamla can only patrol 40 times a year. Evaluation of adequacy, Bakamla has carried out strategies in the form of increasing the capacity of human resources and equipment, involving other agencies, and mobilizing direct community participation, but the adequacy of Bakamla in conducting surveillance is still lacking. Evaluation of equalization, Bakamla has divided the maritime region, namely the northern region which is dominated by the sea and the southern region where there are many land areas, but in this equalization Bakamla is still not optimal because the patrol boats needed are not sufficient. Evaluation of responsiveness and accuracy, Bakamla cooperates with several institutions but Bakamla has not coordinated effectively between agencies in the process of implementing its activities.

Keywords: Bakamla, *Illegal Fishing*, Natuna

A. PENDAHULUAN

Wilayah lautan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang melimpah memiliki arti yang penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung unsur antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, serta menjadi salah satu penghela (*prime mover*) pembangunan nasional. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km² (75 persen dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut territorial, 2,8 juta km² perairan laut nusantara, dan 2,7 juta km² Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Yunitasari, 2020). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara ilegal melalui kegiatan *illegal fishing*.

Praktik penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* adalah ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya alam di sektor perikanan dan perairan sebuah negara (Tim Riset MBKM DIPA BLU UNILA, 2023). Kedua sektor ini merupakan bagian penting dari kedaulatan suatu negara, oleh sebab itu, penangkapan ikan ilegal juga mengancam kedaulatan suatu negara tersebut. Praktik *illegal fishing* dapat merusak populasi ikan dan mempengaruhi ekosistem laut, sehingga mengurangi kesempatan bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara legal dan berdampak pada keberlanjutan industri perikanan.

Illegal Fishing juga memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat Natuna. Tindakan *illegal fishing* memberikan gangguan terhadap kebebasan untuk menangkap ikan dan juga merugikan hak-hak sosial dan ekonomi para nelayan lokal. Dengan adanya tindakan *illegal fishing* juga mengakibatkan stok ikan yang ada di perairan laut Natuna berkurang dan memunculkan dampak buruk bagi ekosistem laut (Muhamad, 2012).

Dilihat dari sisi ekonomi, *illegal fishing* juga sangat berpengaruh terhadap GNP (*Gross National Product*) yang pada dasarnya jika tindakan ini tidak terjadi maka akan menambah pendapatan secara aktual bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan pendapatan yang seharusnya terjadi dapat terjadi melalui peningkatan berbagai bentuk pembayaran yang harus dilakukan oleh operator penangkapan ikan yang sah, seperti biaya pendaratan, biaya lisensi, pajak, dan pungutan lainnya. Selain itu, dampak ekonomi makro tambahan juga terjadi akibat kehilangan ikan dan sumber daya laut ke kapal-kapal ilegal. Hal ini melibatkan konsekuensi terhadap anggaran

pemerintah, termasuk penurunan pendapatan dari penjualan ikan dan produk laut lainnya, serta pengurangan pajak yang diperoleh (Ismail et al., 2018).

Pada tahun 2020-2021, kerugian negara dalam sektor perikanan mencapai Rp 30 triliun, sedangkan potensi perikanan di Laut Natuna mencapai Rp 120 triliun per tahun. Nelayan asing memiliki keahlian yang lebih tinggi dalam menangkap ikan dan mereka menggunakan peralatan yang canggih. Mereka juga lebih berani dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas, meskipun menggunakan kapal berukuran relatif kecil. Nelayan asing punya kemampuan yang lebih dalam menangkap ikan. Dengan kapal hanya bermuatan 28 sampai 30 ton, mereka berani ke lautan lepas (Kompas.com, 2021).

Permasalahan yang menjadi salah satu kelemahan Indonesia terutama di Natuna adalah karena infrastruktur dan kapal yang digunakan kalah canggih dari kapal pencuri ikan dari negara lain. Hal ini menyebabkan penangkapan kapal pencuri ikan tidak maksimal dan banyak yang berhasil lolos. Selama menjalankan operasinya, para pencuri ikan ini lebih fokus pada penangkapan cumi sebagai target komoditas. Pada tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindakan hukum terhadap 72 kapal, termasuk 7 kapal berbendera Vietnam, 5 kapal berbendera Malaysia, dan 60 kapal berbendera Indonesia.

Illegal Fishing yang terjadi di Indonesia khususnya di daerah natuna menjadi masalah public bagi Indonesia sehingga peran pemerintah diperlukan dalam menangani hal tersebut. Maka salah satu Badan yang bertugas untuk melakukan keamanan di laut Natuna adalah BAKAMLA (Badan Keamanan Laut). Badan ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan penjagaan keamanan serta keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi.

Tahun 2021 pada kuartal pertama, melalui data AIS (*Automatic Identification Systems*) dan citra satelit ESA Sentinel-2, terdeteksi keberadaan banyak kapal ikan Vietnam yang diduga kuat melakukan *illegal fishing* di bagian utara Laut Natuna Utara dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl. Perkiraan jumlah kapal ikan Vietnam tersebut mencapai lebih dari seratus kapal dalam periode waktu tertentu. BAKAMLA turun langsung Bersama POLRI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menangkap pelaku *illegal fishing* tersebut namun jumlah kapal yang berhasil ditangkap masih sangat kecil dibandingkan dengan total jumlah kapal ikan asing di Laut Natuna Utara, dikutip dari (Maritime security analisis, 2021). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan patroli yang kuat di wilayah-wilayah laut yang rawan,

terutama di Laut Natuna Utara, dan patroli tersebut harus dilakukan secara sinergis oleh berbagai instansi yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan laut.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait strategi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) dalam peranannya sebagai penjaga laut di Indonesia. Salah satu penelitian yang telah mengangkat topik tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Palar, Prakoso, dan Aries (2021) dalam (Patrio, 2022b) yang berjudul "Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia". Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada peran Bakamla dalam upaya mencapai status Indonesia sebagai poros maritim dunia. Penelitian tersebut menyoroti adanya tumpang tindih tugas dengan instansi lain seperti TNI Angkatan Laut di perairan Indonesia. Menurut penelitian tersebut, Bakamla seharusnya menjadi lembaga koordinator tunggal dalam hal keamanan dan keselamatan laut.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Saputra & Prasetyo, 2022) dengan judul "Upaya Bakamla Melaksanakan Operasi Keamanan Laut di Selat Malaka". Penelitian ini lebih menitikberatkan pembahasan mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan BAKAMLA dalam mengamankan laut di Selat Malaka. Bakamla berusaha memperkuat wewenangnya sebagai Calon Indonesia *Coast Guard* untuk meningkatkan keamanan maritim di Selat Malaka. Mereka melakukan operasi laut, kerjasama dengan negara lain, dan membangun sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut. Zona Maritim Barat di Belitung memiliki peran penting dalam mengawasi Selat Malaka. Pangkalan armada dan stasiun pemantauan juga mendukung tugas Bakamla. Namun, optimalisasi keamanan maritim di Selat Malaka masih belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya sinergi antar lembaga dan adanya ego sektoral. Bakamla perlu berkomunikasi dengan baik dengan instansi lain terkait rencana Indonesia *Coast Guard*, dan memperbaiki formasi agar menjadi lembaga yang mandiri tanpa campur tangan dari instansi lain.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rasiddin et al., 2021) dengan judul "Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Pengamanan Dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bakamla hadir sebagai lembaga yang siap melaksanakan tugas dalam menjaga perairan Indonesia, meskipun dihadapkan dengan berbagai ancaman seperti *illegal fishing*, penyelundupan, narkoba, *trafficking*, terorisme, dan bajak laut. Melalui patroli keamanan dan keselamatan, Bakamla mendukung visi pemerintah dalam menjadikan Indonesia aman dan selamat dari ancaman di perairan. Strategi dan rencana strategis

telah disusun oleh Bakamla untuk menjaga keamanan dan keselamatan perairan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 dan Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024. Bakamla RI memiliki komitmen untuk mencapai prestasi melalui tugas dan fungsinya yang diatur oleh peraturan perundangan. Tugas membangun sektor keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia menjadi prioritas bagi Bakamla RI.

Dari ketiga penelitian tersebut menjadikan BAKAMLA sebagai kajian utamanya, Namun peneliti di sini akan membahas tentang “**EVALUASI PENGAWASAN BAKAMLA TERHADAP *ILLEGAL FISHING* DI NATUNA**” untuk mengevaluasi kinerja Bakamla dalam mengawasi dan menanggulangi kasus illegal fishing di wilayah Natuna.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi literatur yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, web dan artikel-artikel terkait. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk menjabarkan atau menganalisis suatu kasus serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan *illegal fishing* di laut Natuna.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan kerangka teori evaluasi dan pengawasan untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan operasional Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Dalam hal ini, evaluasi digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh BAKAMLA.

Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah di sini dapat diukur dengan melihat jumlah kasus *illegal fishing* yang berhasil diidentifikasi, dihentikan, dan ditindaklanjuti oleh Bakamla di perairan Natuna.

Dilihat dari (Maritym Security Analysis, 2021) menunjukkan bahwa ada sejumlah kasus atau praktik IUU (*illegal unreported unregulated*) *fishing* yang berhasil terdeteksi oleh AIS (*Automatic identification system*) dan Citra Satelit ESA sentinel-2 di perairan Natuna Utara pada tahun 2021. Dalam identifikasinya ditemukan kapal Vietnam yang menggunakan alat tangkap Trawl dengan jumlah kapal yang mencapai lebih dari 100 kapal dan praktik ini dilakukan dalam

selang satu periode waktu dari bulan februari – April 2021. Kapal Vietnam tersebut Sebagian telah berhasil ditangkap oleh POLair, Bakamla dan KKP.

Menurut (Maritym Security Analysis, 2021) pada 26 & 28 februari tahun 2021 terdeteksi 77% di wilayah tumpang tindih ZEE Indonesia dengan Vietnam dan sekitarnya 23% berada di dalam ZEE Indonesia. Kemudian pada 18 & 20 Maret 2021, terdapat puluhan kapal ikan Vietnam yang masuk ke perairan Natuna dan di duga melakukan penangkapan ikan secara illegal. Pada tanggal ini, 90% kapal ikan Vietnam berada di wilayah ZEE Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2021, Beberapa kapal ikan Vietnam diduga sedang melakukan *illegal fishing* di dalam ZEE Indonesia (tidak berada di area tumpang tindih). Pada 30 Maret 2021, terdapat 50% lebih kapal Vietnam terdeteksi masuk jauh ke dalam ZEE Indonesia di luar area tumpang tindih klaim Indonesia-Vietnam. Dan yang terakhir 2 April 2021, kapal Vietnam terdeteksi melakukan kegiatan *illegal fishing* dengan jumlah kapal mencapai 100 kapal.

Pada tahun 2022 di susul lagi dengan sejumlah kasus illegal fishing yang telah terdeteksi (Wiyoga, 2023) di sepanjang 2022, IOJI (*Indonesia Ocean Justice Initiative*) menemukan setidaknya 438 kapal ikan Vietnam yang di duga kuat melakukan *illegal fishing*, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di laut Natuna Utara karena sinyal AIS tiba tiba hilang pada hari berikutnya dan diduga bahwa kapal-kapal asing tersebut mematikan AIS guna mengelabui pihak-pihak patroli. Tindakan illegal ini puncak tertingginya adalah pada bulan Mei yaitu terdapat 67 kapal ikan asing. Demudian pada kasus ini patroli mengalami hambatan berupa BBM PDSKP dan Bakamla sudah habis sehingga tidak dapat melanjutkan patroli. Anggaran operasi Bakamla pada tahun 2022 berjumlah kurang dari Rp 370 miliar dan jumlah itu kurang ideal dikarenakan Bakamla membutuhkan anggaran operasi sekitar 1 triliun pertahun. Oleh sebab itu, Bakamla tidak dapat melakukan operasinya atau pengawasan dengan maksimal.

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa Bakamla masih belum bisa dikatakan efektif dalam melakukan pengawasannya di perairan laut Natuna. Dan masih ada banyak kapa lasing yang melakukan tindakan *illegal fishing* belum dapat di deteksi oleh Bakamla. Kondisi tersebut tidak dapat di pungkiri karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Bakamla untuk menjalankan tugasnya.

Analisis Efisiensi

Indikator efisiensi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Bakamla dapat melakukan pengawasan *illegal fishing* di laut natuna secara efisien, yaitu dengan sumber daya yang tersedia

berupa personel, peralatan dan anggaran dengan efektif. Efisien juga dapat dilihat dari produktivitas, kecepatan tanggap dan penggunaan sumber daya yang optimal.

Bakamla dalam menjalankan fungsinya sebagai badan keamanan laut di perairan Natuna menggunakan beberapa alat bantu untuk melakukan patroli yaitu Buoy (alat yang digunakan sebagai pendeteksi kapal yang melintasi ALKI sekaligus menjadi pendeteksi pelanggaran hukum di wilayah Natuna, buoy telah dilengkapi dengan siste sensor AIS dan di bawah buoy diberi sensor bawah permukaan), Drone (merupakan pesawat Nir-awak/PUM yang beroperasi tanpa awak, drone dapat dioperasikan dari darat sehingga memberikan kemudahan bagi Bakamla), *Surveillance Aircraft* (pesawat pengawas dengan awak memiliki jangkauan lebih luas daripada drone), Kapal patroli (Unsur terpenting yang ketersediaannya sangat diperlukan atau harus *stanby* di lokasi, kapal ini yang akan menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan pada wilayah utara Natuna) dan *Underwater Surveillance* (pengawas bawah air yang biasanya digunakan untuk membantu operasi SAR) (Sudiro & Jupriyanto, 2022).

Seperti yang di jelaskan pada bagian analisis efektivitas diatas, Bakamla memiliki anggaran yang kurang untuk melakukan kegiatan pengawasan di perairan laut Natuna Utara. Bakamla juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Bakamla hanya mempunyai sepuluh kapal dengan jumlah bahan bakar yang terbatas. Selain itu, Bakamla tidak memiliki armada untuk melakukan pemantauan udara, sehingga mereka bekerja sama dengan TNI AU dalam memperoleh armada tersebut (Wiyoga, 2023). Jadi, Bakamla juga masih kurang efisien dalam kegiatan patrolinya, ini dapat kita lihat karena sarana dan prasarana yang masih kurang memadai

Analisis Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan alternatif apa yang diambil BAKAMLA untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing* di Natuna dan yang menjadi focus utama adalah tujuan akhir dari tindakan pengawasan BAKAMLA. Dalam (Patrio, 2022) strategi yang dilakukan Bakamla ada 3 yaitu : Peningkatan kapasitas SDM dan peralatan Bakamla, Perlibatan instansi lainnya, dan penerahan partisipasi masyarakat secara langsung.

Pertama, Peningkatan kapasitas SDM dan peralatan Bakamla. Dalam hal ini upaya yang diambil oleh Bakamla dalam meningkatkan kemampuannya adalah dengan mengadakan pelatihan untuk memperkuat keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Jumlah personel Bakamla yang mengikuti pelatihan meningkat setiap tahun, mencapai 1556 orang dalam periode 2015-2019. Pada tahun 2021, Bakamla membuka 372 posisi dalam tes CPNS untuk meningkatkan jumlah SDM di lembaga tersebut. SDM yang dibutuhkan akan mengisi berbagai bidang di empat

wilayah, termasuk Laut Natuna Utara, yang terletak di zona barat Bakamla dengan kantor pusat di Batam, Manado, dan Ambon. Selanjutnya sarana dan prasarana juga tidak kalah pentingnya, seperti kapal, senjata, dan lain sebagainya. Meskipun ada AIS (*Automatic Identification System*) yang bisa mengidentifikasi pelanggaran dari jauh, Bakamla masih membutuhkan personel yang siap bertindak langsung di lapangan.

Tantangan yang di hadapi Bakamla dalam pengamanan wilayah laut terutama di ZEE masih perlu dimaksimalkan akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah di bagian anggaran. Bakamla mendapat dukungan anggaran yang terbatas pada APBN 2023 hanya cukup untuk berpatroli selama 40 hari dalam setahun. Hal ini mengakibatkan Bakamla bergerak jika terdapat potensi insiden atau laporan yang masuk (Ridwan & Muhammad, 2022).

Kedua, Perlibatan Instansi lainnya. Bakamla tentu saja tidak bergerak sendirian dalam sektor penjagaan laut, masih ada badan-badan lain juga yang terlibat yaitu: TNI AL, Polisi Air (Pol air), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP), dan Dirjen Bea dan Cukai. Bakamla sering bekerja sama dengan TNI AL dalam operasi dan latihan bersama. Mereka menjalin sinergi dengan saling bekerja sama. Meskipun Bakamla tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan penyelesaian masalah di laut, mereka bertugas untuk menghentikan dan menangkap pelanggar. Setelah itu, TNI AL akan melanjutkan penindakan hukum berdasarkan permintaan dari Bakamla. Sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan laut Indonesia, keduanya aktif dalam pertukaran informasi. Dalam ranah internasional, Bakamla terlibat dalam berbagai kerja sama internasional dengan militer atau coast guard negara lain dalam bentuk latihan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022, yang mewajibkan Bakamla untuk menjalankan latihan bersama dengan negara-negara lain.

Ketiga, Pengerahan partisipasi masyarakat secara langsung. Dalam menghadapi klaim China di Laut Natuna Utara, Bakamla melibatkan nelayan lokal sebagai bagian dari upaya pertahanan. Nelayan-nelayan ini, disebut Nelayan Nasional Indonesia (NNI), akan menjalankan tugas keamanan sambil mencari ikan dan mengumpulkan informasi. Mereka akan dibekali dengan dukungan komunikasi yang lebih baik. Selain itu, Bakamla juga membentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) yang bertugas menjaga keamanan dan perlindungan lingkungan laut di wilayah Indonesia. Meskipun Rapala memiliki hak khusus, mereka tidak berwenang menegakkan hukum di laut, yang menjadi tugas Bakamla dan instansi terkait. Melibatkan nelayan lokal dan

Rapala sebagai komponen cadangan adalah langkah positif dalam menjaga laut Indonesia, dan keberhasilan strategi ini akan dilihat dari hasil yang dicapai di Laut Natuna Utara dalam menghadapi kapal asing (Patrio, 2022a).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kecukupan Bakamla dalam melakukan pengawasan di laut Natuna masih kurang. Yang paling besar pengaruhnya di sini adalah karena jumlah anggaran yang terbatas sehingga Bakamla hanya dapat melakukan patroli sebanyak 40 kali dalam setahun. Hal ini membuat pengawasan Bakamla masih kurang efektif karena pengawasan yang cenderung terbatas dan Bakamla bergerak jika terdapat potensi insiden atau laporan yang masuk.

Analisis Pemerataan

Analisis pemerataan ini akan mengukur sejauh mana pengawasan Bakamla terhadap *illegal fishing* di laut Natuna. Pemerataan dapat mencakup pendistribusian personel dan kapal patroli secara merata untuk mencakup daerah-daerah yang rawan terhadap *illegal fishing*.

Bakamla di Natuna membagi wilayah zona Maritim menjadi 2 wilayah : wilayah utara yang dominan berupa lautan dan wilayah selatan yang banyak terdapat daratan dan kemudian kedua wilayah ini dibagi menjadi dua bagian lagi sehingga terdapat 4 kuadran wilayah zona maritim Natuna (Sudiro & Jupriyanto, 2022). Bakamla akan melakukan patroli di 4 wilayah kuadran yang telah ditentukan tersebut menggunakan buoy, drone, *surveillance aircraft*, kapal patroli dan *underwater surveillance*.

Dalam tindak pemerataan, Bakamla juga masih kurang maksimal karena kapal patroli yang di butuhkan masih tidak mencukupi.

Analisis Responsifitas dan Analisis Ketepatan

Peran Bakamla (Badan Keamanan Laut) dalam penanganan *illegal fishing* di Natuna, Indonesia, telah menjadi sangat penting. Bakamla Indonesia bertugas melindungi keamanan dan kedaulatan laut Indonesia, termasuk melawan *illegal fishing*. Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115).

Berdasarkan hasil kegiatan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga tersebut, Bakamla belum melakukan koordinasi secara efektif antar instansi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Meski berperan sebagai coast guard, misi Bakamla adalah mengkoordinasikan dan memperkuat sinergi antar instansi terkait untuk memastikan kelancaran proses pengawasan.

Melalui Bakamla negara hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Melalui tugasnya, Bakamla turut mendukung implementasi visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa Bakamla merupakan Badan Keamanan laut yang bertugas untuk melakukan patrol keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum yang berada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla sebagai *cost guard* telah melakukan tugasnya dengan sepenuh hati menjaga dan mengamankan wilayah maritim yang ada di Indonesia dan termasuk juga wilayah perairan Natuna.

Mengacu dari pembahasan yang telah dijabarkan tentang bagaimana evaluasi pengawasan bakamla terhadap illegal fishing di daerah natuna, Bakamla merupakan Badan Keamanan laut yang bertugas untuk melakukan patrol keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum yang berada di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Program kegiatan yang dilakukan bakamla merancang beberapa wilayah untuk menjaga dan memperhatikan tiap-tiap daerah lautan natuna. Bakamla (badan keamanan laut) sebagai *coast guard* telah melakukan tugasnya dengan sepenuh hati menjaga dan mengamankan wilayah maritim yang ada di Indonesia termasuk wilayah perairan Natuna.

Tindakan pengawasan Bakamla di perairan laut Natuna masih belum optimal dan dinilai kurang efektif sebab pengawasan dilakukan hanya beberapa periode waktu dalam satu tahun.

Terbatasnya pengawasan patroli Bakamla disebabkan oleh karena Bakamla masih kekurangan armada pengawas, personil, sarana dan prasarana serta anggaran. Dalam rangka meningkatkan operasional Bakamla, perlu dilakukan peningkatan patroli yang kuat di wilayah-wilayah laut yang rawan, terutama di laut Natuna Utara, dan patroli tersebut harus dilakukan secara sinergis oleh berbagai instansi yang bertanggungjawab dalam menjaga keamanan laut. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberi sumbangsih terhadap dunia keilmuan dan diharapkan ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, K., Kusasi, F., & Fitriana, R. (2018). Perikanan Natuna dan kesejahteraan nelayan pasca penerapan kebijakan *IUU fishing*.
- Kompas.com. (2021, March 12). Negara Merugi hingga Rp 30 Triliun Tiap Tahun Akibat Pencurian Ikan di Natuna. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/12/172819478/negara-merugi-hingga-rp-30-triliun-tiap-tahun-akibat-pencurian-ikan-di?page=all>
- Maritime security analisys. (2021, April 29). *IUU Fishing Di Laut Natuna Utara Kuartal-I 2021 Dalam Kondisi Kritis. Indonesia Ocean Justice Initiative*. <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/04/29/iuu-fishing-di-laut-natuna-utara-kuartal-i-2021-dalam-kondisi-kritis/>
- Maritym Security Analysis. (2021, April 29). *IUU Fishing Di Laut Natuna Utara Kuartal-I 2021 Dalam Kondisi Kritis. Indonesia Ocean Justice Initiative*. <https://oceanjusticeinitiative.org/2021/04/29/iuu-fishing-di-laut-natuna-utara-kuartal-i-2021-dalam-kondisi-kritis/>
- Muhamad, S. (2012). Illegal Fishing di perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan. *Politica, volume 3*(no 1).
- Patrio, Z. (2022). Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, Vol.2 No.4.
- Patrio, Z. (2022). Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 4.
- Rasiddin, L., Prakoso, L., & Sutanto, R. (2021). Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam pengamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Volume 7 Nomor 3.
- Ridwan, F., & Muhammad, H. (2022, December 28). Anggaran Bakamla Didorong Ditambah Antisipasi Ancaman di Laut. *Republika*.
- Saputra, A., & Prasetyo, Y. (2022). Upaya Bakamla melaksanakan operasi keamanan laut di Selat Malaka. *Jurnal Defendonesia*, Volume 6 Nomor 2.
- Sudiro, P., & Jupriyanto. (2022). Konsep operasi patroli Bakamla RI dalam mnghadapi ancaman hibrida di wilayah Zona Maritim Natuna. *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol.10 No.03.
- Tim Riset MBKM DIPA BLU UNILA. (2023, June 15). Eksistensi hukum adat dalam penanggulangan *illegal fishing*. Page Fakultas Hukum Universitas Lampung. <https://fh.unila.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-penanggulangan-illegal-fishing/>
- Wiyoga, P. (2023, January 2). Kapal Ikan Asing Kian Tak Terbendung di Natuna. *Kompas.Id*. "Kapal Ikan Asing Kian Tak Terbendung di Natuna - Kompas.id" <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/01/kapal-ikan-asing-kian-tak-terbendung-di-natuna>

Yunitasari, D. (2020). Penegakan hukum di wilayah laut Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing mengacu pada konvensi *United Nations Convention On The Law Of the Sea*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8 No. 1.